

August 2018

Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Aisha Rasyidila Kusumasomantri
University of Glasgow, aisyarasyidila@hotmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Kusumasomantri, Aisha Rasyidila (2018) "Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 17 : No. 1 , Article 4.

DOI: 10.7454/global.v17i1.28

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol17/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Global: Jurnal Politik Internasional* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

STRATEGI *HEDGING* INDONESIA TERHADAP KLAIM TERITORIAL CINA DI LAUT CINA SELATAN

Aisha R. Kusumasomantri

Email: aisha.rasyidila@ui.ac.id

University of Glasgow

Abstrak

China's territorial claim extended along the waters of South China Sea. With the support of its economic and military power as a rising power of Asia Pacific, China exert a lot of expense to conduct diplomacy with other claimant states, and did not hesitate to use its force. China's effort to asset its claim seen as am agresive behavior, and developing concern among the littoral state, especialy members of ASEAN who are involved with China in the dispute of South China Sea. Meanwhile, Indonesia, as the largest country in ASEAN, approaching china both in diplomacy and military aspect while still maintaining a good relation with United States. This study will discuss further about decision-making and rationale of Indonesia as a middle power country, in response to a conflict that involving a regional great power.

Kata kunci

Hedging Strategy, Foreign Policy, Balance of Power, South China Sea, Indonesia, China, ASEAN, Asia Pacific, Southeast Asia, and United States of America.

Pendahuluan

Indonesia terletak di kawasan Asia Pasifik yang tengah menjadi sorotan dunia internasional. Hal tersebut tak lain disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara yang ada di dalamnya, terutama Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Di antara negara-negara tersebut, Cina merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling pesat. Pertumbuhan ekonomi Cina juga disertai dengan perkembangan kekuatan Cina di bidang politik dan militer, sehingga *bargaining power* Cina menjadi sangat kuat di kawasan Asia Pasifik. Salah satu dampak dari hal tersebut dapat terlihat pada penguatan klaim Cina atas wilayah perairan Laut Cina Selatan, yang mencakup hampir seluruh wilayah perairan tersebut; termasuk fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti kepulauan, barisan karang, bebatuan, dan daratan pasir.¹

Sengketa Laut Cina Selatan menjadi salah satu kajian utama yang mewarnai hubungan diplomatik negara-negara litoral di perairan tersebut, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina dengan Cina. Selain merupakan ladang perikanan yang strategis (7% dari seluruh perikanan dunia), Laut Cina Selatan juga dianggap strategis karena memiliki sumber daya hidrokarbon, gas alam, dan minyak bumi yaitu cadangan potensial minyak sebanyak 213 milyar barel dan gas alam sebanyak dua kuadriliun kubik² yang masih tertimbun di dasar lautnya. Laut Cina Selatan juga merupakan salah satu jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Asia Timur dan Samudera Pasifik dengan nilai perdagangan yang melewati Laut Cina Selatan mencapai 5 milyar USD pertahunnya. Bagi Cina, Laut Cina Selatan merupakan salah satu “laut dekat” yang dinilai memiliki fungsi strategis bagi keamanan Cina, sebagai *buffer zone*-nya di wilayah perairan³.

Apabila ditinjau dari kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan posisi tawarnya di bidang diplomasi, Cina merupakan negara litoral yang paling unggul dalam sengketa tersebut. Dalam bidang diplomasi, Cina lebih banyak merangkul negara-negara litoral Asia Tenggara dengan menggunakan diplomasi jalur bilateral yang lebih tertutup dan bersifat privat. Tetapi setelah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Cina di tahun 1992 dan serentetan konflik bersenjata di antara Cina dan Filipina di tahun 1995⁴; ASEAN bereaksi dengan merumuskan *Declaration on the South China Sea*, yang menyerukan negara-negara yang terlibat sengketa di Laut Cina Selatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Meskipun pada saat itu, Cina menolak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melewati jalur multilateral; sejak tahun 1990 Beijing mulai merubah posisinya dan bergabung ke dalam berbagai kerangka kerjasama multilateral yang disediakan oleh ASEAN⁵. Cina juga memanfaatkan kekuatannya di dalam kerangka kerjasama multilateral—saat ini tercatat bahwa Cina merupakan negara partner perdagangan ASEAN yang terbesar, sehingga banyak negara-negara ASEAN yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap Cina⁶.

Melihat perkembangan Cina di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat (AS), sebagai salah satu aktor eksternal di kawasan ini mulai memperkuat kembali posisinya di Asia Pasifik (*rebalancing*). Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan kesepakatan bilateral penempatan pasukan AS di Darwin oleh Presiden AS, Barack Obama dan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, pada bulan November tahun 2011

untuk menempatkan pasukan 2500 marinir Amerika Serikat di Darwin hingga tahun 2017⁷.

Penempatan pasukan AS di Darwin membuat Indonesia diapit oleh dua kekuatan besar yang berpotensi untuk berkonflik. Dislokasi matra laut Cina dan AS yang dilakukan secara horizontal membuat Indonesia berada di dalam jalur pelayaran AS ke Laut Cina Selatan (melalui Selat Sunda dan Selat Lombok), dan termasuk ke dalam jangkauan serang armada Laut Cina. Indonesia sendiri sebenarnya telah memperkirakan di awal tahun 1990-an bahwa Laut Cina Selatan akan muncul menjadi *titik konflik* di kawasan. Meskipun bukan negara yang terlibat langsung di Laut Cina Selatan, Indonesia tetap terkena dampak dari konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, baik itu dari segi stabilitas politik kawasan, ekonomi, dan militer (dari *spillover effect* dan *arms race* di kawasan Asia Tenggara).⁸Tiga hal tersebut menjadikan isu Laut Cina Selatan menjadi penting bagi Indonesia. Karena itu, klaim Cina di Laut Cina Selatan seharusnya tidak hanya membuat Indonesia mempertimbangkan ulang strategi diplomasinya terhadap Cina, tetapi juga mempertimbangkan posisinya terhadap negara-negara kawasan Tenggara—sebagai poros dari kebijakan luar negerinya. Idealnya—berdasarkan teori *balance of threat*⁹—Indonesia melakukan *balancing* terhadap kebijakan Cina bersama negara-negara ASEAN; untuk menjaga stabilitas kawasannya.

Akan tetapi hingga saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan tren yang sebaliknya. Dari tahun ke tahun (sejak revitalisasi hubungan Indonesia-Cina pada tahun 1990), Indonesia terus merangkul Cina di dalam kerjasama-kerjasama multilateral di dalam tubuh ASEAN, menerima bantuan luar negeri Cina (pada krisis 1997 dan tsunami Aceh di tahun 2004), dan berpuncak pada pembentukan kerjasama strategis Indonesia pada tahun 2005. Selain itu, dalam kerangka Laut Cina Selatan, Indonesia tidak banyak berkomentar mengenai tindakan-tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan¹⁰, dan menyelenggarakan pembuatan *Code of Conduct* bagi Cina (yang juga melibatkan negara-negara ASEAN lainnya)—Hal ini menjadi suatu kasus yang unik untuk dipelajari, karena Indonesia memiliki sejarah hubungan diplomatik yang kelam dengan Cina, khususnya setelah hubungan Beijing-Jakarta dibekukan pada tahun 1967 karena pengaruh komunis Beijing dinilai terlalu mendominasi pemerintahan Indonesia. Berdirinya kerjasama kemitraan menjadi sebuah titik fundamental yang baru bagi kedua negara, untuk mengembangkan hubungan yang stabil dan saling menguntungkan. Di sisi lain, Indonesia berusaha untuk merangkul AS agar Cina tidak

berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Hal tersebut dilakukan dengan tetap menjaga hubungan baik dengan AS di bawah era pemerintahan Presiden Obama. Perilaku tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai perilaku *hedging* Indonesia terhadap Cina.¹¹

Dengan mempertimbangkan perilaku Indonesia menghadapi konflik di Laut Cina Selatan, maka inti dari tulisan ini dapat disimpulkan ke dalam sebuah pertanyaan: mengapa Indonesia melakukan *hedging* terhadap klaim klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan?

Perilaku *Hedging* Indonesia terhadap Cina

Hedging merupakan strategi alternatif dari *balancing*, *bandwagoning*, dan *buck-passing* di dalam kerangka teori *balance of threat*. Secara definitif *hedging* dilakukan oleh negara ketika negara tersebut merasa tidak yakin dengan intensi sumber ancamannya.¹² Strategi ini memungkinkan negara menjalin hubungan dengan partner yang perilakunya tak dapat ditebak di masa mendatang; dengan mengandalkan seperangkat kebijakan yang selain membantu mempererat hubungan bilateral kedua pihak, juga membantu negara tersebut membangun *insurance policy* terhadap ancaman potensial yang ditimbulkan oleh partnernya.¹³ Kebijakan yang biasa dilakukan untuk melaksanakan strategi *hedging* beragam bagi setiap negara, selama hal tersebut masih berada di luar strategi *bandwagoning* atau *balancing* yang murni. Menurut Kuik Cheng Chwee, hal tersebut dapat dilakukan dengan *limited bandwagoning*, perjanjian yang mengikat, pragmatisme ekonomi, penolakan pengakuan hegemoni, dan *balancing* tak langsung (*indirect balancing*).¹⁴

Tabel 1. Perilaku Negara Kecil-Menengah Menghadapi Kekuatan Asimetris

	Fungsi	Modus Operandi/Indikator
<i>Bandwagoning</i> “Profit yang utama”	Memastikan bahwa negara mendapatkan <i>reward</i> dari <i>big power</i>	Membentuk aliansi militer dengan <i>big power</i> , mengkoordinasikan politik keamanan dan luar negerinya
<i>Limited Bandwagoning</i>¹⁵ “Mendapatkan profit dengan berhati-hati”	Mendapatkan keuntungan dari <i>big power</i> di masa depan, tetapi berusaha untuk tidak kehilangan otonomi dan hubungan baik dengan <i>big power</i> lain	Membentuk aliansi politik dengan <i>big power</i> , berkoordinasi mengenai kebijakan luar negeri dan keamanan di beberapa sector

Perjanjian Mengikat “Pentingnya Sosialisasi”	Mengikat <i>big power</i> dalam kerjasama, untuk mensosialisasikan norma dalam institusi, dengan harapan membendung <i>big power</i> tersebut.	Membat dan menjalankan sebuah institusi dengan <i>big power</i> melalui kerjasama bilateral dan multilateral
Pragmatisme Ekonomi “Bisnis yang utama”	Memaksimalkan keuntungan ekonomi dari perdagangan langsung dan investasi dari negara besar, tanpa memedulikan perbedaan politik	Mendirikan dan menjalankan perdagangan langsung dengan negara besar, juga memasuki kerjasama ekonomi bolateral dan regional dengan negara tersebut.
<i>Dominance Denial</i> “Berpengaruh boleh, tetapi tidak mendominasi”	Menghindari dan mencegah negara dominan yang memiliki tendensi untuk mendominasi negara kecil	Memanfaatkan upaya <i>power</i> lain dalam melakukan <i>balancing</i> , memastikan keterlibatan <i>power</i> lain di regional, memberikan dukungan terhadap aliansi lain.
<i>Indirect Balancing</i> “untuk berjaga-jaga”	Bersiap-siap terhadap kemungkinan ancaman	Menjaga hubungan militer (baik aliansi formal maupun non-formal) dengan <i>power</i> lain, dan melakukan modernisasi militernya sendiri tanpa menspesifikkan target dari upayanya.
<i>Balancing</i> “Keamanan yang utama”	Untuk melakukan <i>check and counter balance</i>	Masuk ke dalam aliansi militer dengan negara <i>third power</i> lain, dan memperbaharui persenjataannya, dengan tujuan membendung <i>power</i> tersebut.

(Sumber: Dexian, “Hedging for Maximum Flexibility: Singapore’s Pragmatic Approach to Security Relations with the US and China”, 7)

Indonesia telah melakukan strategi *hedging* terhadap klaim Cina karena telah memenuhi faktor resistensi dan *engagement*, yang ditunjukkan dalam empat perilaku. Pertama, *indirect balancing* yang dilakukan Indonesia dengan AS, sebagai sebuah aktor eksternal yang memiliki kemampuan untuk menyaingi pengaruh Cina, khususnya di bidang keamanan dan pertahanan.¹⁶¹⁷ Indonesia tetap menjaga hubungan kerjasama dengan AS, meskipun hubungan tersebut sempat tersendat di pertengahan 1990-an akibat konflik di Timor Leste, sebagai salah satu upaya Indonesia untuk menjaga hubungan baiknya dengan AS apabila sewaktu-waktu Cina berubah menjadi ancaman di Laut Cina Selatan.¹⁸

Kedua, *dominance denial* dilakukan Indonesia dengan cara yang sama seperti *indirect balancing*, yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan AS. Terdapat sebuah kekhawatiran mengenai keberadaan pengaruh Beijing di dalam politik domestik Indonesia, khususnya setelah percobaan kudeta di tahun 1965 yang dicurigai disponsori oleh Beijing. Karena itu, meskipun pada saat ini Indonesia telah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Cina, Indonesia tetap berusaha agar pengaruh Beijing tidak mendominasi warna politik dalam negerinya. Hal tersebut juga terjadi di tingkat regional, di mana Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya berusaha untuk menciptakan *dynamic equilibrium* di antara negara-negara eksternal kawasan, khususnya Cina dan AS, dengan tujuan memastikan bahwa Kawasan Asia Tenggara terbebas dari pengaruh negara manapun.¹⁹

Ketiga, perilaku *hedging* Indonesia ditunjukkan dengan pragmatisme ekonomi; yang ditunjukkan dengan meningkatnya kerjasama di bidang ekonomi kedua negara dari tahun ke tahun.²⁰ Hubungan kerjasama tersebut juga kemudian menguat di tahun 2005, sehingga memenuhi persyaratan di faktor keempat, yaitu *binding engagement* di antara Cina dan Indonesia melalui kerjasama strategis kedua negara baik itu di bidang ekonomi, sosial-budaya, dan bahkan pertahanan-keamanan.²¹ Keempat hal yang dilakukan oleh Indonesia kemudian dapat mengidentifikasi perilaku Indonesia terhadap klaim Cina sebagai strategi *hedging*—atau tidak mengambil sisi.

Analisis Perilaku *Hedging* Indonesia terhadap Cina

A. Ambivalensi Pandangan Jakarta terhadap Beijing pasca Pembekuan Hubungan Diplomatik: Pro-Cina vs. Anti-Cina

Cina merupakan negara komunis pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia semenjak pemindahan kekuasaan pemerintah Indonesia dari kolonial belanda pada tahun 1949. Meskipun hubungan tersebut telah terjalin lebih dari enam puluh tahun, hubungan diplomatik di antara Indonesia dan Cina bersifat rapuh, dan dipenuhi berbagai intrik dan kecurigaan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan oleh pandangan elit-elit Jakarta yang tetap melihat Cina sebagai sebuah negara yang memiliki peranan besar dalam penyebaran komunis di era perang dingin.²² Oleh Jakarta, keberadaan Beijing selalu dipandang melalui tiga kaca mata: 1) Penyebaran komunisme, 2) Perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan 3) Keberadaan pebisnis Cina, sebagai kaum minoritas dengan pengaruh ekonomi yang kuat.²³

Perspektif Indonesia terhadap Cina kerap kali dipengaruhi oleh perspektif masyarakat Indonesia mengenai etnis Tionghoa di Indonesia; sehingga pandangan awal Indonesia selalu menganggap Cina sebagai sebuah ancaman bagi politik domestik dan keamanan nasional Indonesia.

Pada masa awal hubungan diplomatik kedua negara, Cina memegang peranan penting di dalam proses *state-building* di Indonesia. Di masa itu, Indonesia merupakan negara yang baru berdiri, dan Cina membantu Indonesia untuk mendapatkan legitimasinya di dunia internasional. Beijing, dalam hal ini, memiliki kepentingan untuk mendapatkan dukungan politik dan ekonomi dari etnis Tionghoa yang berdomisili di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mendukung dan mendanai pembentukan PKI di Indonesia. Bagi rezim Soekarno di masa itu keberadaan PKI dianggap sebagai kekuatan yang dapat memberikan perimbangan dari pengaruh Barat, sehingga keberadaan PKI didukung baik oleh pemerintah Cina maupun pemerintah Indonesia. Akan tetapi, secara pribadi Soekarno pun tidak memercayai Cina sepenuhnya. Hal tersebut terkait dengan kekhawatiran Soekarno bahwa ekonomi Indonesia “dikontrol oleh pihak asing”, mengingat terdapat banyak pengusaha Tionghoa-Indonesia yang menguasai sektor-sektor strategis di Indonesia—golongan pengusaha yang kesetiannya masih diragukan. Terlebih pihak militer dan kelompok Muslim khawatir bahwa Beijing dapat memberikan pengaruh subversi kepada masyarakat.²⁴ Meski begitu, pengaruh Cina semakin menguat, yang ditandakan dengan munculnya PKI sebagai salah satu partai terkuat di Indonesia.²⁵

Hubungan Indonesia-Cina berakhir pada tahun 1965, ketika PKI dituduh sebagai promotor utama dalam kudeta pemerintahan Soekarno. Cina dicurigai oleh pemerintah Indonesia sebagai dalang dari upaya kudeta yang gagal. Pada tahun 1966, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, secara resmi menuduh bahwa Cina melakukan turut campur di dalam politik dalam negeri Indonesia, dengan mendukung PKI melakukan upaya kudeta. Selanjutnya pada tahun 1967, dalam sebuah wawancara di Mesir, Adam Malik menuduh Cina menyediakan pelatihan militer pada ribuan orang Indonesia yang hidup di Cina, sebagai persiapan untuk sabotase militer dan ekonomi Indonesia.²⁶ Meskipun detail dari kudeta tersebut hingga saat ini masih tetap menjadi misteri, era baru di bawah Soeharto memberikan label terhadap kounisme (khususnya Beijing) sebagai sebuah ancaman nasional. Pada tahun 1967-1990, hubungan kedua negara memasuki periode “pembekuan”.²⁷

Istilah pembekuan itu memiliki dua implikasi strategis yang bersifat jangka pandang bagi Indonesia. Pertama, dengan menyatakan bahwa hubungan kedua negara tidak sepenuhnya rusak, kedua negara dapat melanjutkan hubungan diplomatik secara mudah apabila keadaan memungkinkan. Kedua, konsep tersebut akan mencegah terbangunnya hubungan Indonesia dengan Taiwan, karena Indonesia masih mengakui Cina sebagai partner resminya.²⁸ Hal tersebut terlihat dari bagaimana Indonesia masih mendukung perwakilan pihak komunis Cina di PBB, khususnya untuk menjadi anggota permanen dari Dewan Keamanan. Pada tahun 1971, Adam Malik menyatakan bahwa, “Tahun ini Indonesia akan mendukung masuknya Cina ke dalam PBB”. Meskipun pada akhirnya Indonesia memvoting *abstain*, dianggap aneh oleh sebagian pihak khususnya karena pemerintah Indonesia—yang sangat sensitif terhadap Cina—mendukung pihak komunis Cina untuk menduduki posisi yang bergengsi di dalam Dewan Keamanan.²⁹ Terlebih, kemampuan rezim untuk mempertahankan order politik dan sosial sangat penting, sehingga persepsi “*triple China threat*” (komunisme, Tionghoa-Indonesia, dan Beijing) tidak pernah benar-benar dihilangkan.³⁰

Perbedaan suara tersebut menggambarkan dikotomi akan pandangan Indonesia terhadap Cina. Di satu sisi, Departemen Luar Negeri (Deplu) Indonesia menginginkan revitalisasi dengan Cina sesegera mungkin. Deplu melihat bahwa pengembalian hubungan tersebut penting karena beberapa hal; pertama, Deplu melihat bahwa permasalahan di antara Indonesia dan Cina dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi; kedua, tindakan anti-Cina Indonesia menyalahi prinsip Non-Blok yang selama ini dipegang teguh oleh Indonesia; ketiga, Deplu mempertimbangkan signifikansi pengaruh hubungan diplomatik dengan Cina bagi Indonesia di dunia internasional. Hubungan diplomatik dengan Cina menjadi salah satu tren kawasan Asia Tenggara semenjak tahun 1970-an. Hal tersebut pada akhirnya membuat Indonesia kesulitan dalam memperoleh peran besar di politik Asia Tenggara.³¹ Dapat dilihat pada tahun 1970-an, ketika Indonesia membatalkan upayanya dalam menjadi perantara penyelesaian masalah di Kamboja. Pada saat itu, Cina menolak untuk mengirimkan perwakilannya ke Jakarta, bersamaan dengan dua sekutunya yaitu Korea Utara dan Vietnam Utara. Pertemuan tersebut kemudian dibatalkan karena tanpa kehadiran negara-negara komunis, khususnya Vietnam Utara dan Cina, pembicaraan tersebut tidak akan memiliki signifikansi khusus.³²

Pihak lain yang menginginkan pengembalian hubungan Cina-Indonesia berasal dari kalangan pebisnis. Pada awalnya, kalangan bisnis (khususnya pebisnis Tionghoa) tidak memiliki kepentingan apapun di dalam dinamika politik antara Cina dan Indonesia. Para pebisnis Tionghoa khawatir bahwa kedekatannya dengan Cina dapat membuktikan kecurigaan bahwa kalangan mereka menjadi penyokong dana bagi PKI. Baru pada pertengahan tahun 1970-an, komunitas bisnis mulai mencari cara untuk mengembalikan hubungan dagang mereka dengan Cina. Kepentingan kalangan ini murni di bidang ekonomi, dan tidak dipengaruhi oleh faktor politik.”³³

Sementara itu, pihak militer (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI) dan golongan Muslim malah berperan sebagai pihak yang menentang revitalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia, dan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat posisi mereka sebagai oposisi Cina.³⁴ ABRI sendiri sesungguhnya bukan sebuah lembaga yang memiliki pandangan politik monolitik, karena pandangan mengenai normalisasi militer dengan Cina terbagi menjadi dua. Pertama, golongan tentara yang lebih moderat, yang mendukung normalisasi hubungan kedua negara. Golongan ini menyadari bahwa hubungan diplomatik dengan negara-negara *great power* merupakan hal yang penting dan dapat membantu Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketahanan nasional. Akan tetapi golongan moderat tidaklah terlalu banyak dibandingkan dengan golongan anti-normalisasi (garis keras) di militer—yang biasa disebut sebagai “Elang”. Golongan ini menilai bahwa komunisme masih merupakan sebuah bahaya laten bagi keamanan nasional Indonesia. Mereka percaya bahwa golongan komunis di Indonesia “tidak akan pernah menghentikan upaya untuk menjatuhkan pemerintah Indonesia melalui jalur militer, merubah Indonesia menjadi negara komunis, dan menghancurkan Pancasila”. Selain itu, ABRI juga percaya bahwa Cina merupakan supporter utama PKI yang berasal dari pihak eksternal di Indonesia yang—setelah pemberantasan PKI di Indonesia—masih menjaga hubungan dan dukungannya terhadap golongan-golongan komunis yang tersisa.³⁵

Selain ABRI, golongan yang menentang normalisasi hubungan Cina-Indonesia adalah golongan muslim Indonesia. Sama seperti ABRI, golongan muslim pun memiliki pandangan yang beragam terhadap hubungan Indonesia-Cina. Beberapa tokoh Islam yang terkenal seperti Chalid Mawardi (dari NU) dan Ridwan Saidi (dari Partai Persatuan Pembangunan) melakukan berbagai advokasi mengenai normalisasi hubungan kedua negara atas dasar-dasar yang mirip dengan Deplu.³⁶ Presiden

Abdurrahman Wahid, yang berasal dari golongan Muslim (diangkat pada tahun 1999, sembilan tahun semenjak normalisasi hubungan Indonesia-Cina) bahkan menjadi salah satu tokoh yang paling gencar mempromosikan penghapusan diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa, dan penguatan hubungan Cina-Indonesia.³⁷ Akan tetapi mayoritas golongan Islam khawatir bahwa pengembalian hubungan diplomatik dengan Cina akan mendukung kemunculan kembali komunis di Indonesia.³⁸

Golongan terakhir yang menentang normalisasi adalah kelompok nasionalis di Indonesia. Kelompok ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan golongan. Golongan ini memiliki afiliasi yang dekat dengan sebuah warta harian “Merdeka” yang seringkali disebut sebagai sebuah media yang “Pro-Moskow dan Anti-Beijing”, dan secara aktif membuat propoganda mengenai hal tersebut. Kelompok nasionalis Indonesia juga berpendapat bahwa mengembalikan hubungan diplomatik dengan Cina merupakan sesuatu yang beresiko, baik itu di dalam bidang politik maupun ekonomi.³⁹

Perbedaan dua pandangan di Indonesia tersebut (pro-normalisasi vs. anti-normalisasi) terus terjadi, bahkan hingga hubungan Indonesia-Cina dikembalikan pada tahun 1990. Meskipun secara diplomatik Indonesia mulai terbuka pada Cina, hal tersebut tidak mengubah pandangan fundamental pihak-pihak yang anti-normalisasi terhadap Beijing. Meskipun secara kasat mata hubungan Cina-Indonesia terus meningkat pasca revitalisasi; ambivalensi hubungan Cina-Indonesia masih tetap terjadi. Pada tahun 1994 contohnya, ketika terjadi protes anti-Tionghoa di Medan, Beijing turun tangan untuk meredakan suasana. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu bukti bahwa hingga masa revitalisasi hubungan, Beijing masih berusaha untuk melakukan kontrol politik terhadap Jakarta. Hal tersebut tergambar dalam pidato mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja:⁴⁰

“Kami masih mengingat era tahun lima puluhan, di mana pemerintah Indonesia melarang masyarakat Tionghoa di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ekonomi di distrik-distrik pedesaan. Sebagai perwakilan dari negara yang bersahabat, misi diplomatik Cina seharusnya berjalan beriringan dengan peraturan tersebut, dan menyarankan rakyatnya untuk mematuhi. Akan tetapi, Cina melakukan hal yang sebaliknya, dan menyarankan rakyatnya untuk melawan peraturan tersebut. Hal itu telah mengajarkan kami sebuah pelajaran yang berharga.”⁴¹

Setelah kejatuhan rezim Soeharto di 1998, secara umum pemerintahan Indonesia cenderung lebih terbuka dalam kebijakan-kebijakannya terhadap Cina. Diskriminasi etnis Tionghoa dihapuskan, sehingga menghilangkan faktor yang menghambat

hubungan kedua negara. Selain itu, pembatasan perjalanan ke Cina ditiadakan sehingga menyebabkan meningkatnya arus perpindahan manusia.⁴² Hingga akhirnya pada tahun 2005, Indonesia dan Cina pun menandatangani sebuah perjanjian untuk melakukan kemitraan strategis baik itu di bidang ekonomi, industri, sosial-budaya, maupun pertahanan.

Meskipun Cina sekarang telah menjadi partner strategis Indonesia; Indonesia masih menggunakan strategi *wait and see* untuk membangun hubungan dengan Cina pasca revitalisasi, khususnya di bidang politik dan keamanan. Dibandingkan pendekatan yang bersifat bilateral dengan Cina, Indonesia lebih banyak melakukannya dalam kerangka kerjasama multilateral melalui ASEAN—khususnya ASEAN Regional Forum.⁴³ Hal ini memberikan Indonesia semacam jaminan, bahwa pengaruh Cina dapat dibendung terlebih dahulu di tingkat regional, sebelum akhirnya berdampak terhadap politik dalam negerinya. Karena itu, Indonesia juga menjadikan politik di tingkat kawasan sebagai salah satu fokus utama dari kebijakan luar negerinya.

B. Dampak Klaim Teritorial Cina di Laut Cina Selatan dalam Perspektif Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan wilayah geografis yang paling luas di Asia Tenggara. Indonesia terletak pada 6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan, dan membentang sepanjang 95° Bujur Timur dan 141° Bujur Barat. Posisi tersebut merupakan posisi yang signifikan secara strategis, karena berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik; dan memiliki dua selat terpenting dalam perdagangan internasional, yaitu selat Malaka dan Selat Lombok. Secara geografis, Indonesia berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di utara. Hal tersebut membuat Indonesia terpit di antara dua *great power* Asia Pasifik, yaitu Cina di utara dan AS di selatan (via Darwin).

Posisi geografis tersebut membuat Jakarta sadar, bahwa keamanan nasionalnya juga akan sangat bergantung terhadap stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan kawasan di tingkat kawasan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pidato Menteri Luar Negeri Indonesia di Washington D.C., bahwa “Bagi Indonesia, dengan kondisi geografisnya [yang berada di antara di jantung kawasan Asia Tenggara], masa depan kawasan Indo-Pasifik menjadi kepentingan utama Indonesia saat ini.”⁴⁴



Gambar 1. Peta Indonesia

(Sumber: , “Jakarta’s Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific”, 2.)

Meskipun telah melakukan pengembalian hubungan dengan Cina, Indonesia masih menyimpan beberapa kekhawatiran bahwa Cina akan menjadi ancaman bagi keamanan nasionalnya dan kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dijabarkan ke dalam beberapa faktor: Pertama, kekhawatiran mengenai serangan yang dilakukan PLA dari utara; kedua, peran Cina dalam memicu instabilitas politik dalam negeri negara-negara Asia Tenggara; dan terakhir; sengketa maritim di Laut Cina Selatan, di mana klaim Cina turut memengaruhi stabilitas dan keamanan di perairan tersebut.⁴⁵ Sebenarnya, isu ini telah berkembang sejak tahun 1970-an dan 1980-an, tetapi permasalahan di politik domestik membuat Indonesia tidak mengambil posisi di dalam permasalahan ini. Hanya saja, pada saat itu berkembang sebuah doktrin di badan militer, yang mengkhawatirkan datangnya serangan dari *great power* dari arah utara—yang didasari oleh peristiwa perang Pasifik pada tahun 1940-an. Serangan Cina ke Vietnam pada tahun 1979 memperkuat pandangan ini. Serangan tersebut menunjukkan bahwa tidak tertutup kemungkinan bagi Beijing untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai kepentingannya. Selain itu, Cina juga terlibat dalam lebih dari 17 bentrokan bersenjata dalam Konflik Laut Cina Selatan sepanjang tahun 1974 hingga tahun 2002.⁴⁶

Tak mengherankan bahwa sifat agresif Cina di Laut Cina Selatan pada tahun 1990-an membangkitkan kembali sentimen “ancaman Cina” di antara pembuat kebijakan pertahanan dan kalangan militer di Indonesia. Buku putih Cina yang dikeluarkan pada

tahun 1995 memberikan sebuah gambaran bahwa dengan kemajuan ekonomi, teknologi, dan militernya, Cina mampu menjadi negara dengan kemampuan militer yang terkuat di Asia. Jakarta sendiri telah mengasosiasikan agenda ekspansionis Cina di Laut Cina Selatan sebagai salah satu upayanya untuk mendominasi kawasan. Pada tahun 1990-an, militer Indonesia bahkan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa “Cina merupakan sebuah ancaman langsung bagi kedaulatan [Indonesia].⁴⁷”

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pendapat Budi Susilo Soepandji, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Indonesia, yang mengatakan bahwa Laut Cina Selatan turut memberikan dampak terhadap Indonesia di tiga bidang, yaitu stabilitas ekonomi, stabilitas politik regional, dan stabilitas keamanan.⁴⁸

Pada aspek ekonomi, konflik di Laut Cina Selatan akan memengaruhi Indonesia secara langsung, khususnya pada tingkat produktivitas komoditas energi dan kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara *great power* dan Asia Tenggara.⁴⁹

Dari segi politik, kekhawatiran Indonesia dapat diringkaskan ke dalam sebuah pertanyaan: Bagaimana sengketa di Laut Cina Selatan memengaruhi hubungan antar negara-negara di Asia Pasifik? Semenjak ASEAN terbentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia berusaha untuk menempatkan Asia Tenggara sebagai ‘lingkar konsentrasi utama’ di dalam politik luar negerinya, dan ASEAN sebagai *sogokuru (cornerstone)*-nya.⁵⁰ Sementara itu, tak dapat dipungkiri bahwa sengketa Laut Cina Selatan merupakan akar dari ketegangan Beijing-ASEAN selama lima dekade terakhir. Hubungan diplomatik di antara negara-negara pengklaim sempat mengalami kemajuan, semenjak Cina memutuskan untuk melaksanakan *strategic pause*, dan mengubah pendekatan kebijakannya melalui jalur multilateral (dalam kerangka ASEAN). Akan tetapi semenjak tahun 2011, konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan menjadi semakin kompleks. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan negara-negara pengklaim, dan negara-negara intra kawasan saja; tetapi juga melibatkan *great power* yang merupakan aktor ekstra-kawasan di Asia Pasifik. AS yang mulai memperkuat basis pertahanannya di kawasan ini memberikan sebuah jaminan kepada negara-negara Asia Tenggara akan keamanan dan stabilitas regionalnya.⁵¹

Tindakan *rebalancing* AS, yang ditunjukkan sebagai perimbangan kekuatan Cina di Asia Pasifik, menjadi sebuah titik terang bagi negara-negara Asia Tenggara—yang memiliki kekhawatiran atas dominasi kekuatan Cina di wilayahnya. Hanya saja Indonesia khawatir *rebalancing* AS akan menjadi pisau bermata dua, yang berpotensi menghadirkan polaritas di antara negara-negara ASEAN.⁵² Dalam sistem

intergovernmental yang dianut oleh ASEAN, arah kebijakan masing-masing negara anggota tak bisa diganggu gugat oleh pihak lain, khususnya karena negara-negara Asia Tenggara sepakat untuk menganut prinsip non-intervensi di dalam politik luar negerinya. Apabila polaritas terjadi di antara anggota ASEAN, maka hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran integrasi regional, khususnya karena ASEAN melaksanakan terbentuknya komunitas ASEAN pada tahun 2015.⁵³

Terakhir, dampak yang ditimbulkan oleh klaim Cina akan berpengaruh di bidang keamanan. Sebagai negara maritim dan negara kepulauan, Indonesia memiliki kekhawatiran khusus terhadap kenaikan kekuatan maritim Cina selama beberapa dekade terakhir, khususnya mengenai intensi Cina yang sebenarnya di Asia Pasifik. Berbeda dengan AS yang memiliki *track record* sebagai negara hegemon yang selama ini menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik; Cina menunjukkan indikasi perilaku agresif dengan sejumlah klaimnya di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Pada tahun 1993, klaim Cina mencakup perairan yang mengelilingi wilayah kepulauan Natuna, meskipun hal tersebut tidak direspon secara resmi oleh pemerintah Soeharto. Hal itu juga yang kemudian mendorong Indonesia untuk mendeklarasikan bahwa Selat Malaka, Kepulauan Andamar, dan Nicobar di Samudera Hindia merupakan prioritas utama bagi keamanan Indonesia. Negara manapun yang dapat menguasai wilayah ini dapat memiliki posisi tawar yang besar di dalam jalur perdagangan komersil di dunia internasional; sehingga Jakarta pun percaya bahwa ketiga wilayah ini perlu dibebaskan dari pengaruh negara-negara eksternal-kawasan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan nasional Indonesia.⁵⁴

Di sisi lain, *engagement* Cina terkait jalur-jalur pelayaran strategis di Indonesia lebih banyak didasari oleh kepentingan perdagangan, karena perdagangan Cina ke Indonesia dan Australia menggunakan tiga selat tersebut. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa Cina juga melakukan upaya untuk menghambat pergerakan kapal-kapal perang AS ke Laut Cina Selatan. Pada tahun 2002 lalu, Cina menandatangani kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk membangun sebuah jembatan besar yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Rencananya, proyek pembangunan jembatan tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Dengan adanya jembatan tersebut, pelayaran yang terjadi di Selat Sunda setidaknya akan lebih terkontrol, sehingga Cina tak perlu mengkhawatirkan penempatan tak terduga yang dilakukan oleh AS. Cina juga menawarkan diri untuk memasang radar di wilayah tersebut, sebagai salah satu cara untuk memantau pergerakan kapal-kapal di wilayah Selat Sunda.^{55 56}

Permasalahan lain di bidang keamanan adalah *arms build up* yang terjadi di Laut Cina Selatan.⁵⁷ Perkembangan kekuatan militer negara-negara pengklaim di Laut Cina Selatan, khususnya pada angkatan laut dan udara, menyebabkan naiknya standar kekuatan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Naiknya standar kekuatan di kawasan ini membuat Indonesia berpotensi untuk terjebak di dalam *security dilemma*⁵⁸. Saat ini, Indonesia masih merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara.⁵⁹ Akan tetapi, pada realitasnya, baik matra udara maupun matra laut di Indonesia bahkan masih kekurangan alutsista untuk mengamankan teritorialnya sendiri. TNI AL hanya memiliki 115 kapal, dan hanya 25 di antaranya yang dapat beroperasi secara maksimal. Sementara itu, pesawat-pesawat tempur TNI AU kebanyakan tidak dipersenjatai, dan digunakan untuk fungsi pengawasan.⁶⁰ Kenaikan ini dapat menjadi sumber ancaman bagi Indonesia, sekaligus motif Indonesia untuk mengikuti alur *arms race* yang ada di Laut Cina Selatan. Sejauh ini, Indonesia belum melakukan penambahan jumlah persenjataan untuk merespon perlombaan senjata yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi terdapat beberapa tindakan yang dilakukan Indonesia sebagai reksi dari *Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2014 dilaksanakan di perairan Anambas dan Natuna, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas maritim di wilayah tersebut dan meningkatkan profesionalitas angkatan bersenjata dalam penanggulangan bencana alam. Meskipun latihan ini difokuskan pada peran militer dalam menanggulangi bencana, beberapa pengamat pertahanan Indonesia melihat latihan ini sebagai salah satu respon Jakarta dalam menanggapi klaim Cina di Laut Cina Selatan. Terlebih, Jakarta juga menyadari bahwa *nine dashed line* yang menjadi dasar klaim Cina menyinggung wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna.⁶¹

B. Keuntungan Hubungan diplomatik Cina-Indonesia bagi Indonesia

Indonesia menyadari bahwa terdapat beberapa keuntungan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, sehingga pada akhirnya Indonesia—yang semula anti terhadap Beijing—memutuskan untuk mendekati diri kepada Cina dengan menandatangani kerjasama kemitraan pada tahun 2005. Keuntungan dari kerjasama kedua negara juga dapat dilihat sebagai salah satu alasan utama mengapa Indonesia kemudian memutuskan untuk melakukan *hedging* terhadap kebijakan Cina di Laut Cina Selatan. Hal yang didapatkan Indonesia dari kerjasama tersebut berkisar pada aspek-aspek yang sama dengan ancaman yang ditimbulkan oleh klaim Cina di Laut Cina Selatan, yaitu pada bidang ekonomi, politik, dan militer.

Setelah revitalisasi hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia, hubungan kedua negara dimulai dengan kerjasama di bidang ekonomi; khususnya di bidang investasi, perdagangan, dan bantuan luar negeri. Cina sendiri baru dipandang sebagai partner strategis di bidang ekonomi pada tahun 1980-an, ketika perekonomian Cina mengalami kenaikan yang signifikan.⁶² Kenaikan ekonomi Cina menggeser perspektif ancaman dari Cina, dari yang semula bersifat militer menjadi ancaman yang bersifat ekonomi. Akan tetapi pada tahun 1990-1998, Indonesia mulai merasakan dampak positif dari pertumbuhan perekonomian Cina. Pada masa itu, ekspor Indonesia-Cina mengalami kenaikan jumlah yang signifikan di bidang non-migas, dari 580 juta dolar AS menjadi 1,32 milyar dolar AS—dengan neraca perdagangan surplus.⁶³

Sejak tahun 2010, semenjak *ASEAN China Free Trade Area* (CFTA) diberlakukan di Indonesia, neraca perdagangan Cina menunjukkan nilai surplus terhadap Indonesia. Tetapi meskipun Indonesia mengalami defisit dalam nilai ekspornya, secara keseluruhan Indonesia masih mengalami keuntungan karena jumlah ekspor Indonesia ke Cina meningkat dari tahun ke tahun.⁶⁴ Pada 2013, nilai ekspor Indonesia ke Cina bahkan mencapai angka 42,9 milyar Dolar AS, sehingga menempatkan Cina sebagai negara tujuan ekspor terbesar Indonesia.⁶⁵ Direktur Propmosi dan Pencitraan Kementerian Perdagangan Indonesia, Marolop Nainggolan, bahkan berkata bahwa Indonesia saat ini seharusnya meningkatkan fokusnya ke pasar Cina. Selain karena Cina merupakan pasar terbesar di dunia (dengan penduduk sekitar 1,3 milyar orang, mengalahkan Eropa dan AS), perekonomian Cina juga cenderung lebih stabil. Diperkirakan, terdapat 184.000 masyarakat Indonesia di Cina yang memiliki aset kurang lebih 10 milyar Dolar AS.⁶⁶

Bidang investasi juga mengikuti pertumbuhan di bidang perdagangan. Pada tahun 2012, tercatat sebesar 141 juta Dolar AS dengan 190 proyek. Tahun 2013, Cina kembali menanamkan investasi sebesar 32,8 milyar Dolar AS, yang ditandatangani dalam sebuah *Joint Venture Agreement* oleh 23 perusahaan Cina.⁶⁷

Selain itu, Cina juga membuktikan bahwa pihaknya merupakan partner yang lebih terpercaya dibandingkan negara-negara lainnya. Pada pertengahan tahun 1997, ketika Indonesia mengalami krisis finansial yang berkepanjangan, Cina merupakan salah satu negara yang memberikan bantuan luar negeri untuk merevitalisasi kembali perekonomian Indonesia. Cina memberikan pinjaman sebesar 400 milyar dolar AS sebagai salah satu paket pinjaman IMF terhadap Indonesia, dan 200 milyar dolar sebagai fasilitas kredit ekspor Indonesia ke Cina. Cina kembali memberikan bantuan

luar negeri kepada Indonesia di tahun 2004, ketika bencana Tsunami menimpa Aceh. Cina memberikan bantuan cepat terhadap korban bencana sebesar 3 milyar dolar AS. Beberapa bulan setelah itu, Perdana Menteri Cina Wen Jiabao menghadiri *Special ASEAN Leader's Meeting* pasca-gempa bumi dan Tsunami, dan menurunkan 60 juta dolar bagi negara-negara yang terkena dampak Tsunami. Cina juga berjanji untuk mendampingi negara-negara korban untuk melakukan rehabilitasi infrastruktur sebagai program jangka panjangnya.⁶⁸

Kondisi pasar Cina yang menguntungkan, bertambahnya investasi Cina, dan bantuan Cina di kala krisis; membuat Indonesia merasa lebih nyaman dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan Cina, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan AS. Selain itu, dari aspek negosiasi, sesama negara Asia seperti Cina akan lebih banyak melakukan pendekatan yang bersifat informal, dan tidak mementingkan keuntungan jangka pendek. Hal tersebut-lah yang kemudian menyebabkan Indonesia menganggap Cina sebagai salah satu partner ekonominya yang terpenting.

Selain keuntungan yang Indonesia dapatkan di bidang ekonomi; dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, Indonesia juga mendapatkan beberapa manfaat di bidang politik, baik itu di level nasional maupun regional. Pertama, hubungan diplomatik dengan Cina membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam isu-isu yang melibatkan Cina di Asia Tenggara. Sebelumnya telah dibahas bahwa Indonesia sempat gagal menjalankan perannya sebagai perantara di dalam kasus pelanggaran HAM di Kamboja; karena Indonesia memiliki kesulitan untuk melakukan *engagement* dengan Cina dan negara-negara komunis lainnya.⁶⁹ Hubungan baik yang terjalin di antara Indonesia dan Cina selama beberapa tahun belakangan, telah membantu Indonesia untuk mengambil peranan penting dalam isu-isu yang terjadi di Asia Tenggara; termasuk ke dalamnya sengketa di Laut Cina Selatan. Terbukti bahwa semenjak Indonesia mengembalikan hubungan diplomatiknya dengan Cina, Jakarta mendapatkan kemudahan untuk melakukan pendekatan terhadap sejumlah elit-elit politik di Beijing. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang bertugas menjembatani perundingan di antara Cina dan ASEAN, dan bahkan berkewajiban untuk membuat rancangan CoC di Laut Cina Selatan, sebagai upaya untuk mencapai resolusi konflik.⁷⁰

Keuntungan lain yang diperoleh Indonesia di bidang politik adalah terlaksananya hal yang selalu dilakukan sejak awal pemerintahan Soekarno di Indonesia: yaitu

menjaga perimbangan pengaruh pihak eksternal, baik itu di tingkat domestik maupun di tingkat kawasan.⁷¹ Semenjak dibekukannya hubungan Cina-Indonesia, keberadaan Beijing dan pengaruh-pengaruhnya diberikan stigma negatif oleh pihak-pihak elit yang ada di Jakarta. Hal tersebut menyebabkan pengaruh eksternal lainnya, termasuk pengaruh AS, lebih mudah masuk berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Disamping itu, kebencian rezim Soeharto terhadap Beijing dan komunisme mendekatkan elit-elit Indonesia pada pemikiran yang cenderung “pro Blok Barat” di era Perang Dingin (1970-an hingga 1991), di mana AS menyediakan bantuan militer yang ekstensif terhadap Indonesia. Meskipun hubungan ini sempat terhenti pasca-konflik di Timor Leste, hubungan Indonesia-AS kembali menguat pasca peristiwa 9/11 dan kunjungan Presiden AS, Obama, ke Indonesia pada tahun 2010 lalu.⁷² Karena itu, pengembalian hubungan dengan Cina dianggap sebagai sesuatu yang baik, karena dapat memberikan perimbangan pada pengaruh AS di dalam politik domestik Indonesia.

Sementara itu, di tingkat kawasan, negara-negara ASEAN juga berupaya untuk menciptakan sebuah perimbangan antara pengaruh pihak-pihak eksternal di Asia Tenggara (khususnya Cina dan AS). Belajar dari pengalaman sejarah di era kolonialisme, negara-negara ASEAN memiliki stigma yang cenderung negatif terhadap AS dan negara-negara Barat lainnya. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara—kecuali Thailand—pernah dikolonialisasi oleh pihak asing, sehingga menimbulkan trauma tersendiri bagi negara-negara tersebut. Terlebih, beberapa perang perang besar di kawasan Asia Pasifik, seperti Perang Vietnam dan Perang Pasifik, juga dipromotori oleh AS dan sekutunya.⁷³ Semenjak perekonomian dan militer Cina berkembang, pengaruh Cina sebagai *rising power* mulai dirasakan oleh negara-negara ASEAN. Adanya sebuah kekuatan *great power* baru di Asia membuat pengaruh AS dapat diminimalisir di Asia Tenggara—begitu juga sebaliknya. Karena itu, negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, memanfaatkan persaingan AS-Cina sebagai alternatif untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara; yaitu dengan memastikan bahwa tak ada pengaruh eksternal yang terlalu mendominasi di kawasan tersebut.⁷⁴

Pada intinya, keuntungan Indonesia di bidang politik lebih banyak dimunculkan oleh perimbangan dari persaingan pengaruh AS-Cina di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut pada nantinya akan membantu negara-negara Asia Tenggara untuk menciptakan *dynamic equilibrium* dan menghindari konflik antar sesama anggota ASEAN.

Kerjasama dengan Cina juga menghasilkan keuntungan bagi Indonesia di bidang keamanan. Indonesia tidak hanya sadar bahwa Cina merupakan penyeimbang kekuatan AS, tetapi juga merupakan pemasok senjata yang lebih terpercaya dibandingkan negara-negara Barat.⁷⁵ Semenjak kerjasama strategis di tahun 2005, kedua negara lebih banyak melakukan kegiatan latihan bersama, pertukaran perwira, bahkan transaksi dan pengembangan teknologi persenjataan. Perlahan-lahan teknologi persenjataan Cina mendapatkan tempat di dalam militer Indonesia, dan ada kemungkinan di masa depan untuk melakukan produksi bersama teknologi persenjataan di Indonesia. Sebagai gantinya, Indonesia juga melihat Cina sebagai pasar dari senapan otomatis SS-2 yang diproduksi secara domestik di Indonesia.⁷⁶

Meningkatnya hubungan militer kedua negara didorong oleh adanya kebutuhan untuk melakukan modernisasi terhadap peralatan militer Indonesia yang sudah mulai menua. Selain itu, Indonesia perlu memastikan bahwa Indonesia memiliki pemasok senjata dari pihak-pihak yang beragam, setelah menambil pengalaman dari embargo senjata yang dilakukan oleh AS di tahun 1999. Selain itu, kedekatan Indonesia-Cina di bidang militer juga dilakukan untuk mendapatkan perhatian Washington di bidang ini. Singkatnya hubungan kerjasama militer yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina tidak disertai dengan kepercayaan yang tulus, ataupun pengakuan mengenai intensi damai Cina di Laut Cina Selatan. Hubungan ini lebih banyak dilaksanakan secara pragmatis, mengingat Indonesia masih menyimpan kecurigaan atas ekspansi wilayah Cina di Laut Cina Selatan.⁷⁷

Karena itu, kedekatan militer Indonesia dengan Cina juga diharapkan dapat menjadi saah satu faktor bagi Beijing untuk mempertimbangkan ulang kebijakan-kebijakannya yang bersifat Agresif—khususnya yang menyinggung kepentingan Indonesia di dalamnya. Kerjasama di bidang keamanan menjadi salah satu cara Jakarta untuk meyakinkan Beijing bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebijakan “ramah Cina” di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut membuat Cina lebih mudah dalam memercayai Indonesia, khususnya di dalam forum-forum regional (perumusan CoC, ARF, dan AMM), sebagai sebuah negara yang dapat dipercaya dan memiliki posisi netral di ASEAN.

Analisis Strategi *Hedging* Indonesia terhadap Klaim Teritorial Cina atas Laut Cina Selatan

Pandangan Indonesia terhadap klaim teritorial Cina tidak dapat dilihat secara parsial, tanpa mempertimbangkan aspek sejarah yang sempat terjadi di antara kedua negara. Hingga kini, peristiwa yang terjadi pada politik domestik Indonesia di tahun 1960-an membuat Indonesia memiliki trauma tersendiri terhadap pengaruh Beijing di dalam politik domestik Indonesia. Tidak mengherankan bahwa pandangan Indonesia mengenai Cina terbagi dua menjadi “anti-Cina” dan “pro-Cina”, meskipun revitalisasi hubungan kedua negara telah dilaksanakan.

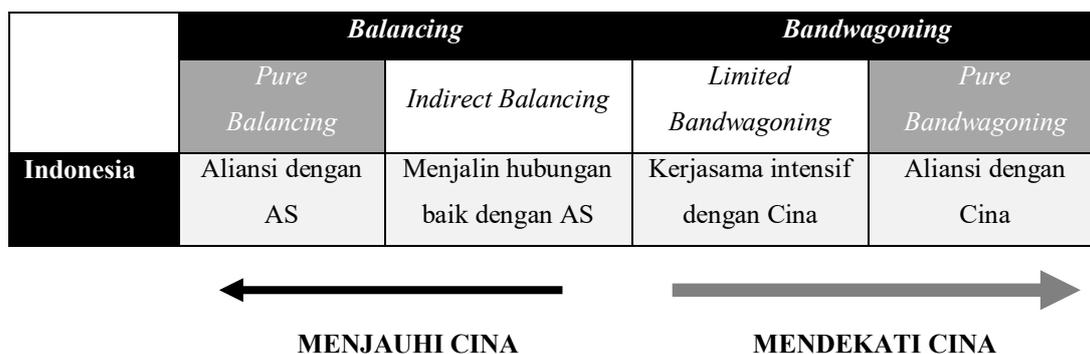
Meskipun setelah berakhirnya Perang Dingin kepentingan Beijing untuk menyebarkan paham komunisme tak lagi ada; pihak militer, golongan Muslim, dan kelompok-kelompok nasionalis di Indonesia hingga kini masih mewaspadaai kemungkinan bahwa pengaruh Beijing dapat memicu kembali tumbuhnya kelompok berbasis komunis di Indonesia. Terlebih, Cina kembali muncul sebagai sebuah ancaman dalam bidang yang berbeda. Bagi beberapa elit pemerintahan dan militer Jakarta, kebijakan-kebijakan ekspansi wilayah Cina di Asia menjadi peringatan mengenai adanya “ancaman” dari agresivitas Cina di level kawasan. Klaim di Laut Cina Selatan merupakan salah satu klaim yang menjadi perhatian Indonesia; karena selain letak geografisnya yang dekat (berada di utara wilayah Indonesia, dan menyinggung sebagian kecil teritorial Indonesia di perairan Natuna), konflik ini juga melibatkan negara-negara ASEAN yang merupakan fokus utama dari politik luar negeri Indonesia semenjak pemerintahan Soeharto. Upaya ekspansi teritorial Cina pada akhirnya menambah isu-isu sensitif Indonesia terhadap Beijing, selain adanya upaya penguasaan politik dalam negerinya.

Di samping adanya kewaspadaan Indonesia terhadap Cina, terdapat juga beberapa kalangan yang optimis terhadap hubungan Cina-Indonesia. Pemerintah (khususnya Departemen Luar Negeri Indonesia) dan kalangan bisnis melihat bahwa pengembalian hubungan dengan Cina merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi kedua negara, baik itu di dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Selama lebih dari dua dekade terakhir, Indonesia dapat turut menikmati dampak dari perkembangan perekonomian Cina yang pesat, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Perkembangan ekonomi Cina juga menyebabkan Cina berhasil mengembangkan industri persenjataan yang mutakhir, sehingga Indonesia memiliki pilihan pemasok senjata baru dengan harga yang lebih terjangkau.

Dari segi politik, Indonesia berhasil menjadi salah satu pihak yang menjembatani negara-negara ASEAN dan Cina di dalam berbagai perundingan mengenai kasus Laut Cina Selatan; dan juga menjadi negara pertama yang dipercaya untuk membuat rancangan CoC di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, kalangan bisnis juga merasakan keuntungan yang besar dari pengembalian hubungannya dengan Cina. Hingga saat ini, Cina menjadi salah satu negara partner Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi pembangunan perekonomian nasional.

Melihat dua pandangan yang bertentangan di atas, memilih salah satu respon tradisional seperti *balancing* dan *bandwagoning* akan menutup sebagian kemungkinan yang dimiliki Indonesia di dalam menghadapi ancaman Cina di Laut Cina Selatan.

Bagan 1. Skenario Respon *Balancing* dan *Bandwagoning* Indonesia terhadap Cina



Apabila Indonesia kemudian menganggap Cina sebagai *imminent threat* dan memutuskan untuk melakukan *balancing*, maka skenario yang akan diperoleh adalah pembentukan aliansi Indonesia dengan AS, sebagai negara ekstra kawasan yang memiliki kemampuan untuk menyaingi kekuatan politik, militer, dan ekonomi Cina. Pilihan ini akan membuat Indonesia dianggap sebagai negara yang “anti-Cina” sehingga menghambat kemungkinan untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dengan Cina, di berbagai bidang yang telah disepakati pada kerjasama kemitraan kedua negara di tahun 2005. Indonesia tidak akan sanggup kehilangan pasar ekspor sebesar 42,9 milyar ASD, dan sejumlah besar investasi asing yang ditanamkan Cina di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga akan kehilangan kredibilitasnya sebagai negara pen jembatan antara ASEAN dan Cina di dalam forum-forum regional, dan kehilangan kepercayaan dari sebagian negara ASEAN yang melakukan *limited bandwagoning* terhadap Cina seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos. Melakukan *balancing* terhadap Cina bukan merupakan pilihan yang paling menguntungkan bagi Indonesia.

Sebaliknya, apabila kemudian Indonesia mementingkan keuntungan yang diperoleh dari kerjasamanya dengan Cina, dan memutuskan untuk melakukan *bandwagoning* dengan Cina, maka Indonesia pun harus mengakui bahwa negaranya merupakan pihak yang inferior di dalam kerjasama tersebut. Hal tersebut berpotensi melemahkan kedaulatan Indonesia, dan memungkinkan pengaruh Beijing kembali masuk dalam politik luar negeri Indonesia—hal yang selama ini menjadi kekhawatiran Jakarta terhadap revitalisasi kerjasama Cina-Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga akan memengaruhi perspektif negara-negara ASEAN terhadap Indonesia, karena Cina merupakan pihak yang dianggap sebagai potensi ancaman bagi mayoritas negara-negara tersebut, khususnya yang terlibat langsung dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Sama seperti pilihan *balancing*, strategi *bandwagoning* juga pada akhirnya akan menurunkan kredibilitas Indonesia sebagai salah satu negara besar yang paling berpengaruh di ASEAN. Karena itu, *balancing* dan *bandwagoning* bukan merupakan sebuah pilihan strategi yang memungkinkan bagi Indonesia.

Adapun, strategi *balancing* atau *bandwagoning* yang dapat dilakukan bukan merupakan strategi tradisional yang murni, tetapi *indirect balancing* dan *limited bandwagoning* yang merupakan bentuk halus dari kedua strategi tersebut. Kedua strategi tersebut, meskipun memperlihatkan kecondongan politiknya ke suatu arah, tetap tidak menutup kemungkinan bahwa negara yang melakukannya tetap memilih opsi lain dalam menentukan arah kebijakannya. Seperti yang dituliskan oleh Le Hong Hiep, bahwa “*hedging* dapat dilakukan suatu negara melalui berbagai cara, selama cara tersebut masih di luar kerangka *balancing* atau *bandwagoning* yang murni”.⁷⁸ Untuk menghadapi klaim Cina, Indonesia sendiri pada saat ini tengah melaksanakan *indirect balancing* dengan AS sebagai salah satu bentuk *hedging*-nya dengan Cina.

Hedging, di sisi lain, hadir sebagai sebuah strategi yang bersifat lebih fleksibel, dan menyediakan lebih banyak opsi bagi Indonesia dalam berhubungan dengan Cina, negara-negara Asia Tenggara, maupun negara-negara ekstra kawasan yang lainnya. *Hedging* memungkinkan Indonesia untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Cina melalui pragmatisme ekonomi dan *binding engagement*; dan di saat yang bersamaan juga melakukan resistensi melalui tindakan *indirect balancing* dan juga *dominance denial*. Hal tersebut menyebabkan Indonesia masih bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari kehadiran Cina sebagai *great power* ekonomi dan keamanan di kawasan; tanpa merusak hubungan baiknya dengan negara hegemon yang ada saat ini, yaitu AS.

Selain itu, dapat dilihat bahwa perspektif negatif Indonesia mengenai klaim Cina melibatkan tiga faktor yang sama dengan keuntungan yang ditimbulkan oleh kerjasama dengan Cina. Setiap permasalahan dan keuntungan tersebut pun berhubungan satu sama lain.

Sebagai contoh, Indonesia khawatir jika naiknya tensi di Laut Cina Selatan akan menghambat kegiatan perekonomian di Asia Tenggara. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan Cina secara tak langsung mencegah permasalahan-permasalahan tersebut terjadi dengan beberapa cara: pertama, kerjasama Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan Cina akan menghambat meningkatnya tensi yang diakibatkan oleh sengketa Laut Cina Selatan. Kedua, kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina mencakup ke dalam sektor energi ,khususnya di Natuna, sehingga Cina akan lebih berhati-hati dalam melancarkan klaimnya di wilayah tersebut. Ketiga, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi partner dagang terbesar Cina—yang berarti komoditas-komoditas Cina pun diangkut melalui jalur pelayaran di Laut Cina Selatan, sehingga mau tidak mau Cina dampak dari kenaikan tensi di Laut Cina Selatan juga akan memengaruhi biaya perdagangan antara Indonesia dan Cina.

Hal yang sama juga terjadi di bidang politik. Indonesia khawatir bahwa klaim Cina yang agresif akan menimbulkan polaritas di antara anggota ASEAN. Akan tetapi, melalui sistem *omni-enmeshment* yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN, hubungan baik dengan Cina membantu Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan sebuah *dynamic equilibrium* antara kekuatan-kekuatan eksternal yang ada di Asia Pasifik. Negara-negara ASEAN melakukan *engaging* terhadap Cina semenjak tahun 1970-an (bertepatan ketika Cina melaksanakan *strategic pause* di Laut Cina Selatan), dan berhasil membangun hubungan baik dengan Cina di berbagai forum dan institusi regional. Indonesia sendiri baru memulai hubungan baik dengan Cina di tahun 1990, dan sejak saat itu intensitas hubungan di antara kedua negara terus meningkat. Selain itu, hubungan dengan Cina juga memudahkan Indonesia untuk melibatkan Cina di dalam forum-forum yang ditujukan untuk sarana resolusi konflik di Laut Cina Selatan, sehingga Cina menjadi lebih mudah dibendung bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.⁷⁹

Tabel 2. Perbandingan Perspektif Indonesia terhadap Klaim Cina dan Manfaat Kerjasama Indonesia

	Ekonomi	Politik	Keamanan
Perspektif Indonesia Terhadap Klaim Cina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instabilitas kawasan di Asia Pasifik dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan perdagangan Indonesia dengan negara-negara yang terlibat konflik. 2. Proses distribusi produk melalui jalur Laut terhambat karena menegangkannya keadaan di Laut Cina Selatan. 3. Klaim Cina di Laut Cina Selatan menghambat kelancaran eksplorasi energi di kepulauan Natuna. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekhawatiran atas terjadinya polaritas politik di antara negara-negara ASEAN yang dapat mengakibatkan instabilitas politik di Asia Tenggara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya upaya penguasaan jalur pelayaran (yang berada di dalam teritorial Indonesia) oleh pihak asing. 2. Terjadinya <i>arms build up</i> di kawasan Asia Tenggara merespon superioritas Cina di matra laut dan matra udara. 3. Penarikan garis <i>nine-dashed line</i> yang menyinggung kepulauan Natuna.
Manfaat kerjasama Indonesia-Cina bagi Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Cina sebagai <i>rising power</i> di kawasan Asia Pasifik (khususnya dalam hal perdagangan, investasi, dan bantuan luar negeri) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan diplomatik dengan Cina mempermudah Indonesia memperoleh peranan penting sebagai pen jembatan dalam resolusi konflik di Asia Tenggara yang melibatkan Cina (termasuk sengketa LCS) 2. Pengaruh Cina dapat menjadi penyeimbang pengaruh negara-negara Barat di dalam politik domestik Indonesia maupun politik Asia Tenggara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudahnya akses pembelian senjata murah, dan pengembangan teknologi alutsista bagi Indonesia. 2. Kerjasama menjadi sebuah fungsi kontrol Indonesia untuk mengurangi keberadaan militer Cina sebagai ancaman.

Karena itu, hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Cina menjadi penting—tak hanya untuk membendung kekuatan Cina di tingkat nasional saja, tetapi juga membendung kekuatan Cina, khususnya dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Terakhir, dari segi pertahanan, Indonesia juga memiliki kekhawatiran akan *spillover effect* dari sengketa Laut Cina Selatan, perkembangan kekuatan maritim dan udara di Asia Tenggara, serta masuknya Cina ke teritorial Indonesia di kepulauan Natuna. Meskipun *engagement* dengan Cina di bidang keamanan tidak bisa menjawab seluruh permasalahan tersebut, tetapi setidaknya hal tersebut dapat meminimalisir kemungkinan bahwa Indonesia dianggap sebagai pihak yang melawan Cina. Selain itu, kerjasama ini juga mempermudah Indonesia memperoleh persenjataan dan pengembangan teknologi militer untuk mengikuti arus perkembangan kekuatan di Asia Tenggara—terutama karena Cina menyediakan harga senjata dan teknologi militer yang jauh lebih terjangkau dibandingkan negara AS ataupun Rusia.

Dari ketiga faktor tersebut, Indonesia mempertimbangkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari kerjasama dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh klaim Cina di Laut Cina Selatan. Hal tersebut menjadi saling memengaruhi, sehingga Indonesia tidak dapat menolak fakta bahwa *engagement* terhadap Cina memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Hal tersebut-lah yang kemudian menjadi pertimbangan utama Indonesia untuk tetap meneruskan hubungan diplomatiknya dengan Cina—meskipun sesungguhnya Indonesia memandang Cina sebagai sebuah ancaman, karena Cina menunjukkan intensi agresif di sengketa Laut Cina Selatan dan Cina belum bisa menunjukkan reliabilitasnya sebagai *rising power*—tetapi tetap mengakui AS sebagai hegemon dan pihak eksternal yang mampu menjaga ketertiban di wilayah Asia Pasifik.

Pada akhirnya, *hedging* menjadi salah satu strategi yang paling rasional bagi Indonesia dalam menghadapi klaim Cina saat ini. Sifatnya yang fleksibel membuat Indonesia dapat merubah posisinya sewaktu-waktu. Apabila salah satu pihak—baik Cina maupun AS—di masa depan dikategorikan sebagai sebuah ancaman, maka Indonesia dapat dengan mudah kembali ke strategi *balancing* atau *bandwagoning*, sesuai dengan keadaan yang ada.

Kesimpulan

Dalam menghadapi klaim Cina di Laut Cina Selatan, Indonesia cenderung berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan politiknya. Indonesia berusaha untuk tetap mengakui AS sebagai sebuah hegemon yang mampu menjaga perdamaian kawasan; tetapi juga berusaha untuk mengatasi ancaman dari naiknya kekuatan Cina dengan cara yang damai, khususnya melalui jalur *engagement*, karena Indonesia memiliki kepentingan di bidang ekonomi, politik dan pertahanan terhadap Cina. Untuk itu, Indonesia pun memberlakukan seperangkat kebijakan dan politik luar negeri yang diidentifikasi sebagai sebuah strategi *hedging* terhadap klaim Cina di Laut Cina Selatan.

Perilaku *hedging* Indonesia dilakukan dengan menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya 1) pragmatisme ekonomi, melalui kerjasama Indonesia dan Cina di bidang perdagangan dan investasi, 2) *indirect balancing*, yang dilakukan Indonesia dengan cara membangun hubungan kerjasama militer dan keamanan dengan Amerika Serikat, 3) *dominance denial*, di mana Indonesia menolak adanya pengaruh Beijing di Indonesia tanpa adanya pengaruh kekuatan besar lainnya yang dapat memberikan keseimbangan, dan 4) *Binding engagement* melalui kerjasama strategis antara Indonesia dan Cina pada tahun 2005.

Hedging dipilih oleh Indonesia karena memiliki sifat yang lebih fleksibel, sehingga dapat mengakomodir kepentingan semua pihak yang ada di Indonesia. Selain itu strategi *hedging* membuat *middle power* seperti Indonesia memiliki lebih banyak pilihan dalam menghadapi negara *great power* seperti Cina. Di satu sisi, Indonesia tetap bisa menikmati keuntungan dari kerjasamanya dengan Cina; sementara di sisi lain, Indonesia juga dapat terus menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan upaya pengamanan nasionalnya—termasuk ke dalamnya menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Apabila sewaktu-waktu konstelasi politik di Asia Pasifik mengalami perubahan, Indonesia selalu dapat mengubah strateginya ke *balancing* ataupun *bandwagoning* sesuai dengan keadaan yang terjadi.

Pada akhirnya, strategi ini merupakan tindakan yang paling rasional yang bisa dilakukan oleh Indonesia saat ini, khususnya setelah mempertimbangkan aspek politik dalam dan luar negeri, keamanan dan geopolitik, serta kebutuhan ekonomi Indonesia terhadap Cina.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (3 September 2013). Indonesia agar Fokus Ekspor ke Cina. <http://www.antaraneews.com/berita/393747/indonesia-agar-fokus-ekspor-ke-china>.
- Antara. Hubungan Militer RI-RRC semakin meningkat. 11 Januari, 2013. <http://www.antaraneews.com/berita/352583/hubungan-militer-ri-rrc-semakin-meningkat>.
- ASEAN (20 Mei 2014). ASEAN Trade Partner 2013. <http://www.aseansec.com/>
- ASEAN. 2013. Statement of ASEAN Foreign Ministers on ASEAN's Six Point Principle.
- BBC China, (4 Desember 2012). China Navy to Carry out Pacific Exercise. 14.30, <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-15866989>
- BBC Indonesia. (2 April 2014)Latihan Gabungan AL jadi momentum Indonesia. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/04/140402_komodo.shtml
- Beckman, Robert. 2013. "The South China Sea: the Evolving Dispute Between China and her Maritime Neighbours". *Geomatics World*, Maret-April 2013 No. 3 Vol. 2, 21-23
- Bedford, Christian. 2011. View From the West: An Arms Race in the South China Sea. *Canadian Naval Review*, Vol 7 No. 3, 39-40.
- Boonpriawan, Lalita. 2012. The South China Sea Dispute: Evolution, Conflict Management, and Resolution. ICIRD. 11-12.
- Bradford, John. 2010. U.S Strategic Interests and Cooperative Activities in Maritime Southeast Asia. *Maritime Security in Southeast Asia*. NBR Special Report No. 24
- Brown, Jessica,. (3 Februari 2011). Jakarta's Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific. *Foreign Policy Analysis*, No. 5, The Centre for Independent Studies.
- Charlyle A. Thayer, "ASEAN Unity Restored by Shuttle Diplomacy?" *Thayer Consultancy Background Brief* (2012).
- Chwee, Kuik Cheng. 2008. The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to the Rising of China," *Contemporary Southeast Asia* Vol. 30, No. 2, 166-170.
- Cliff, Roger, et. All. 2011. Shaking the Heavens and Splitting the Earth: Chinese Air Force Employment Concepts in the 21st Century. *RAND Project Air Force*. 194-201.
- DeSilva-Ranasinghe, Sergei. Darwin's Importance to US Asia-Pacific Strategy, 2-4.
- Dexian, CPT Cai. 2013. Hedging for Maximum Flexibility: Singapore's Pragmatic Approach to Security Relations with the US and China. *Pointer Journal of the Singapore Armed Forces*, Vol. 1. 39 No. 2
- Dibb, Paul. 2001. Indonesia: The Key to South-East Asia's Security. *International Affairs*, Vol. 77 No. 4, 836-837.
- Diesing, Paul. 1971. *Patterns of Discovery in the Social Sciences*. Chicago: Aldine-Atherton.
- Dutton, Peter. 2011. Three Disputes and Three Objective: China and the South China Sea. *Naval War College Review*, Vol 6. No. 4, 44-46.
- DW. (3 Oktober 2013). Sejarah Baru Hubungan RI-Cina. <http://www.dw.de/sejarah-baru-hubungan-ri-cina/a-17133331>

- Febrianto, Vicky. (2 Oktober 2013). China akan tingkatkan Investasi di Indonesia. *Antara News*. <http://www.antaranews.com/berita/398413/china-akan-tingkatkan-investasi-di-indonesia>
- Fravel, M. Taylor, "Clarification of China's Claim?", dari situs (<http://thediplomat.com/2012/03/clarification-of-chinas-claim/>) pada 1 Maret 2014, 15.02.
- George, Alexander L. dan Bennett, Andrew. 2005. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. New York: MIT Press, 184-195.
- Goh, Evelyn. 2005. Great Powers and Southeast Asian Regional Security Strategies: Omni-Enmeshment, Balancing, and Hierarchical Order. *Working Paper No. 84*. Singapura: Institute of Defence and Strategic Studies, 337-340.
- Goh, Evelyn. 2006. Understanding 'hedging' in Asia-Pacific Security. *Pacific Forum CSIS No. 43*, Hawaii: Honolulu University.
- Haitao, Li. (9 November 2012). It Is Appropriate to Struggle Rather than to Fifer in Order to Defend Maritime Sovereignty. *Ta Kung Po*.
- Hiebert, Muray Et. All. 2010. A U.S.-Indonesia Partnership for 2010: Recommendations for forging a 21st Century Relationship. *Report of CSIS Sumitro Chair for South East Study*. CSIS.
- Hiep, Lee Hong. 2013. "Vietnam's Hedging Strategy against China Since Normalization", dalam *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No, 3, ISEAS, 2-4.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: DIA FISIP UI, hal 6.
- Irini, Laimou dan Manianti. 2011. "The Management of Sea Lanes of Communication in South East Asia and the ASEAN Regional Forum Performance", OP 98.11
- Jane Perlez, "Asian Leaders at Regional Meeting Fail to Resolve Disputes over South China Sea," *New York Times*, July 12, 2012.
- JANE. 2012. JANE's Army Inventory database.
- Johnson, Douglas. 1997. Drawn into the Fray: Indonesia's Natuna Meet China. *Asian Affairs* Vol. 24 No. 3, 35-38.
- Kaplan, Robert D. (20 November 2012). The rise of the Chinese Navy and Associated Air Power. *The Manila Times*.
<http://www.manilatimes.net/index.php/news/headlines-nt/25926-the-rise-of-the-chinese-navy-and-associated-air-power>.
- Kedutaan Indonesia di Cina. (4 Mei 2014). China and Indonesia. *Indonesia Embassy in China Website*. <http://id.china-embassy.org/eng/zgyyn/sbgxgk/>
- Kim, Woosang dan Morrow, James D. 1992. When do Power Shifts Lead to War. *Midwest Political Science Association*. 896-922
- Kompas. (2 Juni 2012). China Tawarkan Radar ke Maritim Indonesia. <http://internasional.kompas.com/read/2012/06/02/18331823/China.Tawarkan.Radar.Maritim.ke.Indonesia>
- Kompas.)2 Februari 2014). Perdagangan Indonesia-Cina. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/02/1153057/Perdagangan.Inonesia-China>
- Kroef, Van Der 1970. Indonesia, Vommunist China, and the PKI. *Pacific Community*, No. 5, 29.
- Laksmna, Evan E. 2011. Variations on a Theme: Dimensions of Ambivalence in Indonesia-China Relations. *The Rise of China*. Harvard Quarterly Vol. 8, No. 1

- Leifer, Michael. 1999. Indonesia's Encounters with China and the Dilemmas of Engagement. *Engaging China: The Management of an Emerging Power* London: Routledge, 98-99.
- Liputan 6 (1 Mei 2014). Data dan Fakta Perdagangan Indonesia. <http://bisnis.liputan6.com/read/816618/data-dan-fakta-perdagangan-indonesia-di-2013>
- Liss, Carolin. 2007. Maritime Security in Southeast Asia: Between a Rock and a Hard Place?. Working Paper No. 141. *Asia Research Centre*.
- Mearsheimer, John. F. 2006. China's Unpeaceful Rise. *Current History*. Research Library, 160
- Medeiros, Evan S. 2005. Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability. *The Washington Quarterly*, 29:1, 145-147.
- Mishra, Rahul dan Puspitasari, Irfa. 2010. Indonesia-China Relations: Challenges and Opportunities. *IDS Issue Brief*, 2-6.
- Natalegawa, Marty. (6 Mei 2013). An Indonesian Perspective on the Indo-Pacific. pidato dalam *Conferene on Indonesia* di Washington DC.
- Nong, Hong. 2010. National Institute for South China Sea. Honolulu, University of Hawaii and the Asia Pacific Center for Strategic Studies.
- O'Rourke, Ronald. (22 Februari 2014). China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress. <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf>
- Pal, Deep. (10 April 2014). A Code of Conduct for the South China Sea?. *The Diplomat*. <http://thediplomat.com/2013/09/a-code-of-conduct-for-the-south-china-sea>
- Pew Research Center. American Character Gets Mixed Reviews, dalam Laksmana, Variations on a theme: Dimensions of Ambivalence in Indonesia-China Relations, 26
- Prasanth, Parameswaran. (11 April 2014). Soul Searching after Phnom Penh. *The Diplomat*. <http://thediplomat.com/2012/07/aseans-soul-searching-after-phnom-penh/>
- Qian, Wang. 2011. Maritime Forces to be Beefed Up Amid Disputes”, dalam China Daily Website, (http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-06/17/content_12718632.htm)
- Ranasinghe, DeSilva. (2012). Darwin's Importance to US Asia-Pacific Strategy. *FDI Feature Review*. FDI, 2-4.
- Roy, Denny. 2005. Southeast Asia and China: Balancing or Bandawgoning?. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 17., No. 2. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Saragih, Bagus TB. (10 April 2014). RI Suggest Philippine-ASEAN Synergy on S. China Sea Dispute. *The Jakarta Post*, (<http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/25/ri-suggests-philippine-asean-synergy-s-china-sea-dispute.html>)
- Scholfield, Clive. 1994. An Arms Race in the South China Sea?. *IBRU Boundary and Security Bulletin*.
- Schwartz, Laura. 2012. Competing Claims in the South China Sea: Potential Paths Forward and Implications for the United States. *A Roundtable Report*. NBR Political and Security Affairs.
- Sebastian, Leonard C. 2013. Indonesia's *Dynamic Equilibrium* and ASEAN Centrality. RSIS.
- Severin, o Rodolfo C. 2010. ASEAN and the South China Sea. *Security Challenges*, Vol. 6. No. 2, 37-47.

- Shumei, Wang, et al. 2007. Carry Out the Historic Mission of the Army and Establish the Scientific Concept of Sea Rights. *Zongguo Junshi Kexue*. China Military Science.
- Simon, Sheldon. 2011. US-Southeast Asia Relations: Deep in South China Sea Diplomacy. *Comparative Connection*.
- Simon, Sheldon. 2011. US-Southeast Asia Relations: South China Sea Diplomacy. *Jurnal Comparative Connections*. Arizona: Arizona State University.
- Sinar Harapan (9 Mei 2012). AS dan China Pasang Radar di Perairan RI. <http://sinarharapan.co/index.php/news/read/1609/as-dan-china-pasang-radar-di-perairan-ri-.html>
- Soepandji, Budi Susilo.(23 Mei 2012). Pengaruh Keamanan regional bagi Keamanan Nasional Indonesia <http://budisusilosoepondji.wordpress.com/2012/05/23/pengaruh-keamanan-regional-bagi-keamanan-nasional-indonesia-kasus-sengketa-laut-cina-selatan/>
- Sommerville, Donald. 1999. World War I (History of Warfare). New York: Tandem Library.
- Sriyanto, Nanto. 2013. Hubungan Indonesia-Cina dari Perspektif Politik-Keamanan. *Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*, Lidya Christin Sinaga (ed.). Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, , 109-112.
- Stinchcombe, Arthur. 1968. *Constructing Social Theories*. New York: Harcourt, Brace, 43-45.
- Sukma, Rizal. 1999. The Suspension of Diplomatic Ties: Its function and the roots of Resistance. *Indonesia and China: the Politics of a Troubled Relationship*. London: Routledge. 58-59.
- Sukma, Rizal. 2010. Indonesia Response to the Rise of China Growing Comfort amid Uncertainties. *Chapter V NIDS Joint Research Series No. 5, Asia Pacific Countries' Security Outlook and its Implications for the Defence Sector*. Jepang: The National Institute for Defense Study. 139-149.
- Sukma, Rizal. 2011. Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Southeast Asia.
- Supriyanto, Ristian Atriandi. (19 November 2013). Indonesia and the limits of independence (why hedging isn't a viable strategy). *The Strategist*. <http://www.aspistrategist.org.au/indonesia-and-the-limits-of-independence-why-hedging-isnt-a-viable-strategy>
- Thayer, Carlyle A. (11 April 2014). ASEAN's Code of Conduct in the South China Sea: A Litmus Test for Community Building?. *The Asia Pacific Journal: Japan Focus*. http://www.japanfocus.org/-Carlyle_A_-Thayer/3813
- Thayer, Carlyle A. 2013. Chinese Assertiveness and U.S. Rebalancing: Confrontation in the South China Sea?, presentasi di *The South China Sea: The New Crucible in U.S.-China Relations?*. *Association for Asian Studies, Annual Conference*. California: San Diego.
- Tiezzi, Shannon. (10 April 2014). Why China isn't Interested in a South China Sea Code of Conduct. *The Diplomat*. <http://thediplomat.com/2014/02/why-china-isnt-interested-in-a-south-china-sea-code-of-conduct/>
- TNI, (25 November 2005). TNI AL tetap berencana beli Alutsista dari Negara Luar AS. <http://www.tni.mil.id/view-1646-tni-al-tetap-berencana-beli-alutsista-dari-negara-di-luar-as.html>
- TNI. (2 Mei 2014). Latihan Bersama TNI dan Tentara Pembebasan Rakyat Cina. <http://www.tni.mil.id/view-55600-latihan-bersama-tni-dan-tentara-pembebasan-rakyat-cina.html>

- TNI.(23 Oktober 2002). Panglima TNI Menerima Kunjungan Dubes RRC.
<http://www.tni.mil.id/view-87-font-colorbluepanglima-tni-menerima-kunjungan-dubes-rrcfont.html>
- Truman, Harry S., (12 Desember 2012). Proclamation 2667 of September 28, 1945 Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Seabed of the Continental Shelf.
http://www.oceancommission.gov/documents/gov_oceans/truman.pdf.
- Voice of America. (26 Mei 2014). Akibat Sengketa, Perusahaan Minyak Enggan Investasi di Laut Cina Selatan. <http://www.voaindonesia.com/content/akibat-sengketa-perusahaan-minyak-enggan-investasi-di-laut-cina-selatan/1483282.html>
- Walt, Stephen M. 1985. Alliance Formation and The Balance of World Power. *International Security* Vol. 09 No. 04. Boston: The MIT Press
- Yuan, Jingdong. 2012. Emerging Maritime Rivalry in The South China Sea: Territorial disputes, sea-lane security, and the Pursuit of Power. *International Security Research and Outreach Programme International Security an Intellegence Bureau*. University of Sydney. 12-14.

Catatan belakang

-
- ¹ Carlyle A. Thayer, "Chinese Assertiveness and U.S. Rebalancing: Confrontation in the South Cina Sea?", presentasi di *Association for Asian Studies Annual Conference*, San Diego, California (2013).
- ² Voice of America, "Akibat Sengketa, Perusahaan Minyak Enggan Investasi di Laut Cina Selatan", 26 Mei 2014, <http://www.voaindonesia.com/content/akibat-sengketa-perusahaan-minyak-enggan-investasi-di-laut-cina-selatan/1483282.html>.
- ³ Lihat bab 2.2, bagian b, kepentingan keamanan Cina.
- ⁴ Kedua hal tersebut menimbulkan sebuah kecemasan "Teror Cina" di kawasan Asia Pasifik, karena negara-negara ASEAN mulai menyadari bahwa kekuatan Cina terus berkembang, dan jauh melampaui kekuatan negara-negara lain yang terlibat di dalam sengketa Laut Cina Selatan. Dari sinilah, negara-negara ASEAN mulai melakukan inisiatif untuk "mengikat" Cina, dengan cara merangkulnya melalui perjanjian dan forum-forum multilateral, (Yuan, 2012).
- ⁵ Jingdong Yuan, *Emerging Maritime Rivalry in the South China*, (Sidney: University of Sidney, 2012), 22.
- ⁶ -, "ASEAN Trade Partner 2013", 20 Mei 2014, <http://www.aseansec.com/>
- ⁷ DeSilva-Ranasinghe, "Darwin's Importance to US Asia-Pacific Strategy" *FDI Feature Review*, (FDI, 2012), 2-4.
- ⁸ Akan dibahas lebih lanjut di bab III, sub bab 3.1.1, "Perspektif Indonesia terhadap Klaim Cina di Laut Cina Selatan", hal xx.
- ⁹ Lihat Bab I, sub. Bab 1.5.1 "Operasionalisasi Konsep", 12-16.
- ¹⁰ Rizal Sukma, "Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Southeast Asia", (2011), 42-44.
- ¹¹ *Ibid.*
- ¹² Denny Roy, "Southeast Asia and China: Balancing or Bandawgoning?", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 17., No. 2, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), 1-2.
- ¹³ Le Hong Hiep, "Vietnam's Hedging Strategy against China Since Normalization", dalam *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No, 3, (ISEAS, 2013), 2-4.
- ¹⁴ Kuik Cheng Chwee, "The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to the Rising of China," *Contemporary Southeast Asia* Vol. 30, No. 2 (2008), 166.
- ¹⁵ *Limited Bandwagoning* berbeda dari *bandwagoning* murni (*pure bandwagoning*) dalam tiga aspek. Pertama, biasanya *bandwagonin* megambil bentuk dalam kerjasama atau aliansi militer, kedua *bandwagoning* biasanya berlaku dalam hukum *zeru-sum* teori di mana aliansi dengan *big power* otomatis akan menjauhkan negara tersebut dari *power* lain, dan ketiga, ketika melakukan *bandwagoning* negara

tersebut akan menerima posisi inferior-superior dalam hubungan mereka. Hal tersebut tidak teradi di dalam *limited bandwagoning* (Dexian).

¹⁶ Muray Hiebert Et. All, "A U.S.-Indonesia Partnership for 2010: Recommendations for forging a 21st Century Relationship", Report of CSIS Sumitro Chair for South East Study, (CSIS: 2013),

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dutton, "Three Disputes and Three Objective: China and the South China Sea"

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kompas, "Perdagangan Indonesia-Cina", 2 Februari 2014,

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/02/1153057/Perdagangan.Indonesia-China>.

²² Rizal Sukma, "Recent Development in Indonesia-China Relations," *Contemporary Southeast Asia*, Vol, 16, No. 1 (Juni 1994), 35-45.

²³ Laksmana, "Variations on a theme: Dimensions of Ambivalence in Indonesia-China Relations", 26.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Rizal Sukma, "The Suspension of Diplomatic Ties: Its function and the roots of Resistance", *Indonesia and China: the Politics of a Troubled Relationship*, (Routledge: 1999), 58-59.

²⁷ Laksmana, "Variations on a theme: Dimensions of Ambivalence in *Indonesia-China Relations*", 26.

²⁸ Van Der Kroef, "Indonesia, Vommunist China, and the PKI", *Pacific Community*, No. 5 (1970), 29.

²⁹ Sukma, "The Suspension of Diplomatic Ties: Its function and the roots of Resistance", 60.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, 90.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, 61-63.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sukma, "The Suspension of Diplomatic Ties: Its function and the roots of Resistance", 65-66.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, 25-27.

⁴¹ Sukma, "The Suspension of Diplomatic Ties: Its function and the roots of Resistance", 59.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Marty Natalegawa, "An Indonesian Perspective on the Indo-Pacific", pidato dalam *Conferene on Indonesia* di Washington DC, 6 Mei 2013.

⁴⁵ Laksmana, "Variations on a theme: Dimensions of Ambivalence in Indonesia-China Relations", 28.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Budi Susilo Soepanji, "Pengaruh Keamanan regional bagi Keamanan Nasional Indonesia", Blog pribadi Budi S. Soepandji (Gubernur Lemhanas RI), 23 Mei 2012,

<http://budisusilosoepondji.wordpress.com/2012/05/23/pengaruh-keamanan-regional-bagi-keamanan-nasional-indonesia-kasus-sengketa-laut-cina-selatan/>.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Rizal Sukma, "Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Southeast Asia" (2011), 42-46.

⁵¹ Schwartz, "Competing Claims in the South China Sea: Potential Paths Forward and Implications for the United State", 2-4.

⁵² Rizal Sukma, "Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Southeast Asia", *Op. Cit.*

⁵³ Leonard C. Sebastian, "Indonesia's *Dynamic Equilibrium* and ASEAN Centrality", 2-3.

⁵⁴ Brown, "Jakarta's Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific", 7-8.

⁵⁵ Sinar Harapan, "AS dan China Pasang Radar di Perairan RI," 9 Mei 2012,

<http://sinarharapan.co/index.php/news/read/1609/as-dan-china-pasang-radar-di-perairan-ri-.html>.

⁵⁶ Kompas, "China Tawarkan Radar ke Maritim Indonesia, 2 Juni 2012,

<http://internasional.kompas.com/read/2012/06/02/18331823/China.Tawarkan.Radar.Maritim.ke.Indones>
a

-
- ⁵⁷ Christian Bedford, "View From the West: An Arms Race in the South China Sea", *dalam Canadian Naval Review*, Vol 7 No. 3 (2011), 39-40.
- ⁵⁸ Lihat Burchill et. all, "Theories of International Relations", Vol. 3, (Palgrave, 2001), 38.
- ⁵⁹ Lihat grafik 2.3
- ⁶⁰ Carolin Liss, *Maritime Security in Southeast Asia: Between a Rock and a Hard Place?*, Working Paper No. 141, (Asia Research Centre, 2007)
- ⁶¹ BBC Indonesia, "Latihan Gabungan AL jadi momentum Indonesia", 2 April 2014, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/04/140402_komodo.shtml.
- ⁶² Laksmana, "Variations on a theme: Dimensions of Ambivalence in Indonesia-China Relations", 27.
- ⁶³ *Ibid.*
- ⁶⁴ Apabila dilihat dari *zero sum game*, meskipun neraca perdagangan Indonesia ke Cina mengalami defisit dalam neraca perdagangan, Indonesia tetap diuntungkan karena nilai ekspor Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut berarti kedua negara mendapatkan keuntungan tertinggi dari perdagangan tersebut. Apabila Indonesia atau Cina memutuskan untuk menghentikan perdagangannya, maka kedua negara akan sama-sama merugi karena bagi pihak pengimpor, permintaan dalam negeri (yang hanya dapat diperoleh dari impor) tidak terpenuhi, dan negara pengekspor kehilangan pasar. (Morgenstein dan Neumann, 1994).
- ⁶⁵ Kompas, "Perdagangan Indonesia-Cina".
- ⁶⁶ Antara, "Indonesia agar Fokus Ekspor ke Cina", 3 September 2013, <http://www.antaraneews.com/berita/393747/indonesia-agar-fokus-ekspor-ke-china>.
- ⁶⁷ Vicky Febrianto, "China akan tingkatkan Investasi di Indonesia, Antara News, "http://www.antaraneews.com/berita/398413/china-akan-tingkatkan-investasi-di-indonesia.
- ⁶⁸ Rizal Sukma, "Indonesia Response to the Rise of China Growing Comfort amid Uncertainties", *Chapter V NIDS Joint Research Series No. 5, Asia Pacific Countries' Security Outlook and its Implications for the Defence Sector*, (Jepang: The National Institute for Defense Study, 2010), 139-149.
- ⁶⁹ Rizal Sukma, "The Suspension of Diplomatic Ties: Its function and the roots of Resistance", *Indonesia and China: the Politics of a Troubled Relationship*, (Routledge: 1999), 58-59.
- ⁷⁰ Shannon Tiezzi, "Why China isn't Interested in a South China Sea Code of Conduct", (<http://thediplomat.com/2014/02/why-china-isnt-interested-in-a-south-china-sea-code-of-conduct/>), 10 April 2014, 13.07 WIB.
- ⁷¹ Brown, "Jakarta's Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific", 1.
- ⁷² *Ibid* 9-10.
- ⁷³ Sukma, "The Suspension of Diplomatic Ties: Its function and the roots of Resistance", 149-152.
- ⁷⁴ Jessica Brown, "Jakarta's Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific", *Foreign Policy Analysis*, No. 5, (The Centre for Independent Studies, 3 Februari 2011), 3.
- ⁷⁵ Antara, "Hubungan Militer RI-RRC semakin meningkat", 11 Januari 2013, <http://www.antaraneews.com/berita/352583/hubungan-militer-ri-rrc-semakin-meningkat>.
- ⁷⁶ Pew Research Center, "American Character Gets Mixed Reviews," dalam Laksmana, "Variations on a theme: Dimensions of Ambivalence in Indonesia-China Relations", 26-30.
- ⁷⁷ *Ibid.*
- ⁷⁸ Hong Hiep, "Vietnam's Hedging Strategy against China Since Normalization", dalam *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No, 3, (ISEAS, 2013), 2-4.
- ⁷⁹ Evelyn Goh, "Great Powers and Southeast Asian Regional Security Strategies: Omni-Enmeshment, Balancing, and Hierarchical Order", *Working Paper No. 84*, (Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, 2005), 337.